ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ahmidi¹, Khusnul Khatimah², Diva Fitaloka Oktaviani³, Novita Angraeni⁴
ahmidiartikel@gmail.com¹, khusnulmuhammad17@gmail.com², divafitaloka691@gmail.com³
IAIN Palangka Raya

Abstrak: Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan yang komprehensif terkait objek sengketa dalam Pemilu di Indonesia. Hal ini berangkat dari menurunnya kualitas pemilu yang ada di Indonesia diakibatkan pelanggaran norma hukum pada masa pemilu berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif untuk mengkaji secara yuridis tentang penyelesaian dan perbedaan objek sengketa dalam pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jenis sengketa pemilu terdapat dua macam yakni sengketa proses yang diajukan ke Bawaslu dan sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perbedaan objek sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu adalah, sengketa proses berupa keputusan KPU yang dianggap merugikan hukum dan peserta selama proses pemilu serta permasalahan yang terjadi antar peserta pemilu seperti pertikaian mengenai alat peraga kampanye, sedangkan sengketa hasil hanya sebatas hasil perhitungan KPU dan pelanggaran selama proses pemilihan yang mempengaruhi hasil suara peserta pemilu.

Kata Kunci: Sengketa Proses, Sengketa Hasil, Pemilu, Wewenang.

***Abstract:** This research aims to provide a comprehensive explanation regarding the object of disputes in elections in Indonesia. This departs from the declining quality of elections in Indonesia due to violations of legal norms during the election period. In this research, the normative legal method is used to juridically examine the resolution and differences in the object of disputes in elections. The results of this study indicate that there are two types of election disputes, namely process disputes submitted to Bawaslu and election result disputes submitted to the Constitutional Court (MK). The difference in the object of process disputes and disputes over election results is that, process disputes are in the form of KPU decisions that are considered detrimental to the law and participants during the election process and problems that occur between election participants such as disputes over campaign props, while disputes over results are only limited to the results of KPU calculations and violations during the election process that affect the vote results of election participants.*

***Keyword:** Dispute, Dispute Over Result, Election, Proses Dispute.*

PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dari demokrasi adalah pemilu, yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Kedaulatan rakyat Indonesia ditunjukkan melalui pemilihan umum. Menurut Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, pemilihan umum harus dilakukan dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. sebagai salah satu bentuk proses demokrasi. Namun, proses ini sering menimbulkan banyak gangguan, baik terkait dengan hasil pemilu, proses penghitungan suara, atau pelanggaran hak pilih.

Perselisihan terkait pemilu merupakan salah satu bagian dari proses penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penyelesaian terkait perselisihan pemilu diperlukan pemahaman mendalam tentang hukum Indonesia, termasuk undang-undang yang mengatur pemilu, hak memilih, dan sistem penyelesaian. Berdasarkan Pasal 466 UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan kabupaten/kota”.

Bisa dikatakan bahwa, berlangsungnya proses pemilu adalah peristiwa yang terjadi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu karena keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota. Sementara itu, perselisihan hasil pemilu adalah gangguan antara KPU dan peserta pemilu tentang perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Meskipun sistem penyelenggaraan pemilu masuk kategori terbaik, namun masih ada kemungkinan pelanggaran yang dapat menurunkan kualitas pemilu. Oleh karena itu, sistem terbaik harus memiliki sistem kelembagaan yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan yang disepakati dan melindungi pemilu. Pelanggaran dan sengketa adalah dua kelompok masalah hukum yang diatur oleh undang-undang Pemilu. Secara umum, pelanggaran pemilihan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu. Sedangkan sengketa datang dalam dua bentuk: sengketa proses dan sengketa hasil. Sesuai dengan konstitusi dan undang-undang pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan penyelesaian tentang hasil pemilu. Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan penyelesaian terkait proses pemilihan, dan lembaga tata usaha negara juga berwenang untuk menyelesaikan penyelesaian tertentu.

Sebagai contoh, pada tanggal 22 April 2024 MK memutuskan perkara No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No.2/PHPU.PRES-XXII/2024. Pada intinya segala permohonan yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD ditolak MK. Jika dilihat kembali, fokus gugatan Tim Nasional Anies dan Ganjar ke MK adalah tentang gangguan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, termasuk mempersoalkan proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, mereka meminta MK untuk mengumumkan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Gibran sebagai peserta Pemilu 2024, termasuk membatalkan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon nomor urut 02. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017, gugatan ini tidak fokus pada selisih angka dari masing-masing kandidat, yang dianggap “salah alamat” dan tidak masuk akal karena MK hanya berwenang untuk memeriksa gangguan suara saja.

Berdasarkan pernyataan di atas, terkait dengan sengketa pemilu di Indonesia ada dua macam yakni, sengketa proses dan sengketa hasil pemilu. Pada penelitian ini akan berfokus pada pendalaman terkait penyelesaian dua jenis sengketa tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia menangani penyelesaian sengketa terkait pemilu dan mengkaji perbedaan dari objek dua jenis sengketa dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana hukum positif di Indonesia dapat diperkuat dan diperbaiki untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan, serta untuk menjamin bahwa hak pilih warga negara dilindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif, lebih tepatnya suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Penelitian ini juga mengkaji secara yuridis bagaimana penyelesaian sengketa terkait pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian dikaji untuk mendapatkan perbedaan terkait penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia yang didasarkan pada buku, jurnal, artikel, UU, dan berbagai referensi lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Sengketa Proses dan Sengketa Hasil Pemilu dalam Hukum Positif di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima penyelesaian sengketa dalam keberlangsungan pemilu. Hal serupa yang telah diketahui, ada dua jenis sengketa dalam UU Pemilu: penyelesaian sengketa proses yang diputuskan oleh Bawaslu dan sengketa hasil pemilu yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota berwenang menyelesaikan penyelesaian terkait pemilu melalui mediasi dan/atau sidang adjukasi. Pasal 466 hingga 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur kewenangan tersebut secara menyeluruh, lebih rinci diatur dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur penyelesaian proses Pemilu. Kewenangan, fungsi, dan tugas Bawaslu diatur dalam UU 7/2017. Menurut Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3), salah satu kewenangannya adalah memutus atau mengadili penyelesaian pelanggaran administratif serta memutus melindungi proses pemilihan. Bawaslu menyelesaikan proses pemilihan melalui tahapan pertama, menerima dan memeriksa permohonan penyelesaian. Setelah itu, mereka berusaha mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Jika tidak, Bawaslu menyelesaikan penyelesaian melalui adjudikasi.

Bawaslu berwenang menerima dan memverifikasi laporan yang menunjukkan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum; pelanggaran administrasi; dan pelanggaran politik uang sesuai ketentuan Pasal 93 huruf (b) UU Pemilu. Bawaslu mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan dan penindakan, namun mereka juga harus melakukan fungsi pencegahan dengan membuat strategi yang tidak hanya fokus pada pengawasan dan penindakan, namun juga mendidik masyarakat umum untuk menjadi pengawas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Lebih lanjut, Pasal 8 Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon

dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: (1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan (2) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta. Adapun mengenai termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antar peserta mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu: Partai Politik atau Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang oleh tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Sedangkan Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yaitu: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Dalam hal sengketa proses yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, tindakan yang dimaksud adalah tindakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan keputusan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945, peradilan Indonesia menggunakan sistem biforkasi, yang berarti ada dua puncak peradilan. Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk oleh buah dari reformasi sebagai lembaga peradilan, memegang kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung (MA). Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah melindungi demokrasi, terutama dalam mengakhiri hasil pemilu.

Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, MK adalah lembaga yang berwenang untuk menangani penyelenggaraan pemilu. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan penyelesaian pemilu merupakan bagian dari hukum dan demokrasi Indonesia. Dalam proses demokrasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal demokrasi, terutama dalam meninjau konstitusi. Jika kita melihat lebih jauh tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan pemilu dan membubarkan partai politik, itu menunjukkan bahwa kehadirannya sangat penting untuk mengawasi dan mengembangkan demokrasi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan masalah perselisihan hasil pemilu didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti; Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 1 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian MK berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilu.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas bahwa penyelesaian sengketa terhadap proses pemilu baik itu pelanggaran administratif dan juga politik uang yang berkaitan dengan berjalannya proses pemilu, maka Badan Pengawas Pemilu yang berwenang untuk menyelesaikannya. Sedangkan penyelesaian sengketa dari hasil pemilu tersebut diselesaikan melalui lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003 bahwa yang diajukan secara tertulis ke MK adalah mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Perbedaan Objek Penyelesaian Sengketa Proses dan Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia

Sebenarnya, pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk mengubah sifat konflik di masyarakat dengan menjadikannya ajang politik yang kompetitif, menciptakan persatuan dan integritas melalui pemilihan umum yang adil, tertib, dan lancar. Pemilihan umum juga merupakan cara untuk memberikan kedaulatan rakyat, yang menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sengketa dalam pemilu dapat didefinisikan sebagai perbedaan, pertentangan, atau kemunduran antara hak warna negara atau subjek hukum pemilu lainnya serta

statusnya dalam hukum atau kepentingan para pihak atau pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, ketegangan terjadi karena pihak-pihak yang berbeda menafsirkan suatu hal atau karena ketidakjelasan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pemilihan umum. Selain itu, adanya pengakuan atau rekomendasi dari salah satu pihak yang bertemu yang ditolak, pengakuan yang berbeda. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa jenis sengketa dalam pemilu ada dua macam yakni sengketa, proses yang ditangani oleh Bawaslu, dan sengketa hasil yang diajukan dan diselesaikan ke Mk.

Berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelanggaran Pemilu meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran peraturan perundang undangan lain yang bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu. Secara definisi objek dari sengketa yang ditangani oleh Bawaslu adalah sengketa terkait dengan sengketa proses Pemilu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang dimaksud objek sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu ini meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Perbawaslu ini menjadi batasan yang memperjelas kewenangan kompetensi absolut Bawaslu dalam proses quasi yudisial.

Ketentuan Pasal 466 UU Pemilu mendefinisikan, sengketa proses Pemilu sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota. Bawaslu menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu (PSPP) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Arti Keputusan yang dimaksud, dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.

Dari ketentuan Pasal 466 di atas, secara eksplisit menyebut bahwa potensi sengketa proses Pemilu hanya 2 (dua) yakni: sengketa Peserta Pemilu antar Peserta Pemilu, dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU. Pasal ini tidak membuka peluang adanya mekanisme hukum sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu lainnya, seperti Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sehingga subyek hukum dalam PSPP hanya ada dua pihak, yakni Peserta Pemilu dan KPU. Kedudukan KPU sebagai pihak yang mempertahankan keabsahan keputusan yang dibuatnya. Adapun objek PSPP yang diajukan ke Bawaslu meliputi Surat Keputusan dan/atau Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan tingkatan struktur (Pusat, Provinsi, atau Kab/Kota) yang dianggap merugikan kepentingan hukum peserta Pemilu tertentu.

Sengketa antar peserta ini paling sering terjadi dimasa tahapan kampanye, terutama soal penempatan alat peraga kampanye yang sering menghalangi alat peraga peserta lainnya, sebagai contoh peristiwa di Kabupaten Pekalongan ada sengketa terkait dengan poster pasangan calon yang ditempel menutupi poster pasangan calon lain. Berkaitan dengan sengketa tersebut tentu sulit mengaitkan dengan keputusan KPU sebagai objek sengketa. Dengan demikian UU No.7 Tahun 2017 sebenarnya tidak menegaskan objek sengketa antar peserta pemilu atau telah terjadi kekosongan norma (*vacuum of norm*) atas objek sengketa antar peserta pemilu. Beranjak dari kekosongan norma atas objek sengketa antar peserta pemilu tersebut, Bawaslu telah mengisinya dengan mengeluarkan peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2014. Dalam perbawaslu tersebut subjek atau para pihak yang bersengketa meliputi partai politik peserta pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mendefinisikan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan

Permohonan sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut konstruksi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sengketa proses Pemilu terangkai dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; (b) Partai Politik Peserta Pemilu; (c) bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (d) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; (e) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (f) calon anggota DPD; (g) bakal Pasangan Calon; dan (h) Pasangan Calon. (Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu No. 18/2017). Kemudian lebih lanjut Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu juga menentukan bahwa: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.”

Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu dapat merujuk pada pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu juncto Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Kemudian Pasal 466 UU Pemilu, dalam bunyi pasal tersebut disebutkan bahwa: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Berkaitan dengan objek sengketa (*objectum litis*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bertolak dari konstruksi Pasal 466 UU Pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena: (a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau (b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”.

Sedangkan mengenai Perselisihan Hasil Pemilu atau sengketa hasil pemilu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kasus PILPRES yang telah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 475 Ayat 3 jelas mengatur hasil pemilihan umum (PHPU) dalam kasus sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur Permohonan yang dikirim secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi mengenai:

1. Pengujian undang-undang terhadap UU Negara Republik Indonesia 1945;
2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UU Negara Republik Indonesia 1945;
3. Pembubaran partai politik;
4. Pertikaian mengenai hasil pemilu;

5. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena mereka diduga telah melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi, penyuapan, penghianatan negara, atau tindakan tercela. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, mereka dapat memulai pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan bertanggung jawab atas tindakannya. Jika bukti bahwa mereka melakukan pelanggaran, Presiden dan/atau Wakil Presiden akan diberhentikan dari jabatannya.

Pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilu tidak hanya berdampak pada kemenangan pasangan calon, tetapi juga merusak dasar demokrasi. Dari berbagai putusan MK yang dapat memperluas objek perselisihan hasil pemilu dalam hal, hasil perhitungan suara yang dibuat oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempengaruhi pemilihan pasangan calon dan penentuan pasang calon pemilu. Tidak hanya penghitungan suara yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu selalu menyebabkan perselisihan hasil pemilu dan selama tahapan pemilihan. Akibatnya, ada banyak kasus perselisihan hasil pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dan ditangani dalam waktu yang sangat singkat 30 hari untuk pemilu legislatif dan 14 hari untuk pemilu presiden dan pilukada.

KESIMPULAN

Proses penyelesaian sengketa proses pemilu yang bersifat administratif dan politik uang merupakan rumah bawaslu. Sedangkan proses penyelesaian sengketa hasil dari pemilu diajukan dan merupakan kewenangan MK untuk mengadili dan memutus terkait perselisihan hasil pemilu. Mengenai objek sengketa yang diajukan ke bawaslu meliputi Surat Keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU yang dianggap merugikan hukum dan peserta, sengketa antar peserta seperti penempatan alat peraga kampanye juga merupakan kewenangan bawaslu. Sedangkan objek sengketa yang diajukan ke MK adalah pertikaian mengenai hasil dari pemilu seperti hasil perhitungan dari KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan pelanggaran selama tahapan pemilihan yang mempengaruhi hasil suara dari pasangan calon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyasa, Pulung. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 149–161.
- Amal, Bakhrul. "Kewenangan Mengadili Oleh BAWASLU Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 306–311.
- Ansori, Mhd. "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia." *Wajah Hukum* 3, no. 1 (2019): 74–80.
- Anwar, Akhmad Hairil. "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 73–89.
- Arbani, Tri Suhendra. "Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Speedy Trial." *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak* (2019).
- Erick, Benni, and M Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 203–219.
- Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busyra Azheri, and Muhammad Ichsan Kabullah. "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling." *Jurnal Konstitusi* (2020).
- Jamil, Jamil. "Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif

- Konstruksi Hukumnya.” *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 12–19.
- Jamil, Jamil, and Ahmad Siboy. “Penegasan Dan Perluasan Objek Dan Subjek Sengketa Antar Peserta Dalam Proses Pemilihan Umum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 129–142.
- Josviranto, Micael. “Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 14275–14280.
- Kadir, Syukron Abdul, and Jefrianus Tamo Ama. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perselisihan Sengketa Pilkada.” *ILAW; International Journal Assulta of Law Review* 1, no. 1 (2024): 55–67.
- Muhaimin, Hikmah, Santosa Santosa, and Nugroho Rendi Adi Pratama. “SOSIALISASI IMPLEMENTASI PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MOJOKERTO.” *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 12 (2024): 2311–2316.
- Muhammad, Muhammad. “Evaluasi Undang-Undang Pemilu.” *Jurnal Arajang* 3, no. 1 (2020): 60–72.
- Nainggolan, Nur Aisyah Fitri Boru, and Marzuki Marzuki. “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang).” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 277–301.
- Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Tiara Alfarissa, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, and Muhammad Fauzan. “Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024.” *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 2 (2023).
- Nuswanto, A Heru, and Wafda Vivid Izziyana. “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum.” *JPEHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4, no. 1 (2023): 92–102.
- Polii, Chrisandy M. “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum.” *Lex Administratum* 9, no. 6 (2021).
- PUTRA, ALIF ANANDIKA, and ABDUL KAHAR MARANJAYA. “Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.” *Ganec Swara* 17, no. 1 (2023): 326–330.
- Putra, Happy Anugraha, and Anwar Noris. “Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia.” *Diversi* 6, no. 1 (2020): 73–91.
- Rikardo, Ofis, Viranti Nur Ikhwan, and Fani Larasati. “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 9–30.
- Ruslan Husen, S H. “Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu” (2023).
- Saleh, Moh, and Hufron Hufron. “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu Dan Pelanggaran Administratif Pemilu.” *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 54–72.
- Syahputra, Agus. “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Melalui Mediasi (Studi Di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 120–128.
- Wahyudi, Ary, and Ahmad Rifai. “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 1 (2023).
- Yanto, M P, Rian Van Frits Kapitan, and Ellon B C Mau. “BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.” *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 1 (2023): 126–137.
- Zoelva, Hamdan. “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): Zoelva-Zoelva.